

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. YANI NOMOR 16 Telp. (0286) 591218

BANJARNEGARA

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL 1	
DAFTAR ISI	2
BAB I : PENDAHULUAN	3
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	9
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
- Sasaran 1	15
- Sasaran 2	21
- Sasaran 3	27
- Sasaran 4	32
- Sasaran 5	37
- Sasaran 6	44
BAB IV : PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pada gambaran umum ini akan kami uraikan tentang Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tergambar dalam Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Banjarnegara, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi Seksi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Komunikasi.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government meliputi Seksi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.
- e. Bidang statistik dan Persandian meliputi Seksi :
 - 1) Seksi Statistik; dan
 - 2) Seksi Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 didukung dengan personil berjumlah 52 (lima puluh dua) orang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang PNS, 2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 8 (delapan) orang THL (Tenaga Harian Lepas), dan 12 (dua belas) orang *outsourcing*.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika hingga akhir bulan Desember 2023 sejumlah 52 orang, terdiri dari 20 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 38,46 persen dan 32 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 61,54 persen.

B. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi dengan baik, permasalahan itu antara lain :

- a. Upaya integrasi antara berbagai aplikasi masih terkendala, disebabkan belum semua aplikasi atau SIM dibangun sesuai standar.
- b. Pusat Data Pemerintah (Data Center) yang belum memenuhi standar nasional.
- c. Serangan siber pada website dan aplikasi pemerintah.
- d. Jumlah dan kapasitas SDM SPBE yang belum mencukupi.
- e. Komitmen masih berada pada tingkatan pimpinan, sehingga perlu adanya penguatan komitmen pada tingkatan bawahan;
- f. Peran komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebaran informasi seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra), dan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informatika (SAKA MILENIAL) yang belum optimal dalam rangka

diseminasi informasi publik

- g. SDM Pengelola data statistik sektoral di masing masing OPD selaku produsen data yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya
- h. Kurangnya SDM Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
- i. Sarana Prasarana yang belum memadai dalam penyelenggaraan statistic sektoral
- j. Masih kurangnya SDM di bidang Persandian;
- k. Kompetensi SDM persandian yang masih kurang;
- l. Sistem Keamanan Informasi yang belum terbangun;
- m. Penilaian Indeks KAMI secara mandiri belum selesai
- n. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung karena belum ada gedung kantor dan peralatan yang memadai
- o. Belum terdokumentasi dengan baik data-data yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP;
- p. Kompetensi SDM dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.
- q. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.
- r. Pengukuran Kinerja belum dapat dijadikan sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- s. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- t. Dokumen Laporan Kinerja belum di reviu secara optimal pada setiap jenjangnya.
- u. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

2. Isu Strategis

Isu-isu strategis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-government, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- a. Keterbukaan informasi publik harus ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat. Di samping itu diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk membuat konten informasi.

- b. Dalam rangka implementasi SPBE dari 6 dokumen arsitektur SPBE baru 2 dokumen yang tersusun, yaitu dokumen Proses Bisnis dan Arsitektur Infrastruktur. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk SPBE dan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 tentang SPBE diperlukan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun non publik. Untuk itu diperlukan pengintegrasian SIM/aplikasi yang terkendala belum adanya regulasi penyusunan dan pengembangan SIM yang sesuai standar.
- c. Kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan pada masing-masing perangkat daerah perlu ditingkatkan. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Daerah diperlukan kerjasama yang baik dari Pembina Data (BPS), Sekretaris Satu Data (Baperlitbang), Wali Data (Dinkominfo) dan produsen data di masing-masing OPD dalam menyediakan data yang berkualitas dan siap berbagi pakai.
- d. Keamanan Informasi maupun aplikasi dari serangan cyber haru ditingkatkan dengan membangun Sitem Keamanan Infromasi. Di samping itu diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan informasi dan peningkatan SDM yang menangani persandian.

Sedangkan lingkungan strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 2 (dua) lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan strategis tersebut perlu diantisipasi agar tidak mempengaruhi kinerja lembaga, baik yang bersifat positif untuk terus dikembangkan dan yang bersifat negatif untuk dihindari.

Mendasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah guna mendukung Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Strategis organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik dapat kita lihat pada 5 (lima) sasaran strategis yang hendak dicapai yakni :

- a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik;

- c. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian;
- d. Menigkatnya nilai survey kepuasan masyarakat;
- e. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah/Meningkatnya nilai akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas maka ditetapkan 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019, yaitu :

- a. Program Aplikasi Informatika, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan tersebut diatas didukung dengan pelaksanaan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan yang terbagi pada :

Tabel 1 Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kominfo Kab. Banjarnegara 2023

No.	Bidang	Jumlah Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	: 7 Sub Kegiatan	Rp. 1.206.473.000
2.	Bidang Penyelenggaraan E-Government	: 5 Sub Kegiatan	Rp. 1.227.002.000
3.	Bidang Statistik dan Persandian	: 5 Sub Kegiatan	Rp. 72.883.800

4.	Sekretariat	: 14 Sub Kegiatan	Rp. 4.752.223.688
Total			Rp. 8.175.426.388

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026

Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah sesuai dengan Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2023 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang memiliki visi ***Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian***. Dalam tahap keempat ini pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Banjarnegara dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara, selaras dengan RPJM Nasional 2023 - 2026 dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2025 – 2045.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang akan datang. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara memiliki harga diri yang lebih, saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 khususnya ***Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab***. Maka diperlukan tujuan dan sasaran dari OPD yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika, menetapkan tujuan dan sasaran program sebagai berikut :

- a. Tujuan, tujuan OPD adalah Sasaran Pemerintah Kabupaten:
- 1) Tujuan 5 RPD dengan sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 2) Tujuan 6 RPD dengan sasaran : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
- b. Sasaran Strategis OPD :
- 1) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan 2 (dua) kegiatan, yakni :
 - a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
 - b) Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan 1 (satu) kegiatan, yakni :
 - a) Kegiatan Pengelolan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daeah Kabupaten/Kota
 - 4) Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung SPBE
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan :

B. Perjanjian Kinerja

Disini akan kami sampaikan Ringkasan/Ikhtisar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, yang memuat informasi semua komponen dalam mencapai sasaran sesuai indikator kinerja yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 khususnya Misi 3 : ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab.***

Kemudian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2023, dengan Alokasi Anggaran murni sebesar ***Rp. 9.260.273.672,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).***

Dengan tujuan utamanya “Meningkatkan pendayagunaan E-Government menuju Banjarnegara *Smart City*” Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas/Eselon II, dengan 6 (enam) sasaran strategis yang juga telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan Indikator Kinerja : **“Nilai Indeks SPBE”** dengan target **2,5 (nilai)**;
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator kinerja: **“Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital”**, dengan target 10%;
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Data dan Statistik dengan indikator : **“Laju Pemanfaatan Data Sektoral”**, dengan target 10%;
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE, dengan indikator **“Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi”** dengan target 56,82%
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**, dengan target NILAI sebesar 84;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan indikator : **Nilai SAKIP OPD** dengan target nilai : **B (61)**.

Sedangkan rincian target Penetapan Kinerja dari masing-masing indikator kinerja Dinas (Eselon II) dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE	2,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	10%
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE	Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi	56,82%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B (61)
II	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik		
5.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital	10%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84
	6 sasaran	6 indikator	

Pada tahun anggaran 2023 terdapat dua kali Refocussing Anggaran, yang pertama mengalami (pengurangan) sebesar **Rp. 616.145.687,-** sehingga anggaran menjadi sebesar **Rp. 8.644.127.985,-** (*delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*).

Kemudian anggaran berkurang kembali karena Refocussing yang kedua, berkurang Rp. 721.627.417,- sehingga anggaran menjadi Rp. **7.922.500.568,-** (*tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pada perubahan, anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 252.925.820,- , sehingga anggaran menjadi **Rp. 8.175.426.388,-** (*delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Demikian ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, adapun Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya 6 (enam) sasaran strategis tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023, menunjukkan bahwa 6 (enam) sasaran strategis tersebut telah memenuhi target.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dilakukan dengan cara menyajikan *rincian hasil pengukuran kinerja Organisasi* dengan menganalisis *tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran*.

Adapun Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003.

Ada 2 (dua) rumus yang bisa digunakan, namun kami hanya memilih menggunakan rumus yang pertama yakni : *Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja*, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\sum \text{Realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100$$

Kemudian melakukan *analisis capaian kinerja dimaksud dengan :*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (*Tahun terakhir*);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (banyak perangkat daerah yang tidak mencantumkan perbandingan dengan standar nasional);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (ketercukupan SDM dan Sarpras bukan menjadi alasan dalam pencapaian/ketidakcapaian);

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
(Berapa program/kegiatan yang hilang/dipangkas dan berapa anggaran yang dihemat. Melihat program/kegiatan tahun sebelumnya dengan program/kegiatan tahun sekarang, dibandingkan Capaian Kinerja dengan anggaran yang digunakan);
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (pada indikator sasaran).

Adapun dari 6 (enam) sasaran strategis yang telah dicapai dengan 6 (enam) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat dinarasikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Indeks SPBE**, dengan target nilai 2,5. Melalui evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB tahun 2023 diperoleh nilai 3,29 sehingga capaian kinerjanya sebesar 131,6% ;
2. Sasaran strategis yang ke dua yaitu : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Indikator Kinerja : **Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital**, dengan target 10% terealisasi 29,25% , sehingga Capaian Kinerjanya mencapai 292,5%.
3. Sasaran strategis yang ketiga yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Statistik, dengan Indikator Kinerja : **Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral**, dengan target 10%. Tahun 2023 terealisasi sasaran sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 1.000%
4. Sasaran strategis yang keempat yaitu : Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE, dengan indikator **Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi**, dengan target 56,82%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 175,99%.
5. Sasaran strategis yang kelima yaitu : *Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dengan target nilai 84 tercapai nilai 84,39 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,46%;
6. Untuk sasaran strategis yang ke enam yaitu : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai SAKIP OPD** dengan target predikat kategori B (61). Target tersebut di tahun 2023 bisa tercapai dengan nilai di 69,40, sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai adalah 113,77%.

Kemudian dari uraian diatas, secara umum menunjukkan hasil yang baik, kemudian secara singkat dapat dijelaskan secara terperinci capaian kinerja tiap-tiap indikator sasaran, sebagai berikut :

Sasaran 1 : "*Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi*", diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : *Nilai Indeks SPBE*, yang pada tahun 2023 ditargetkan nilai 2,5. Indikator ini dipilih untuk mengukur sasaran 1 sesuai hasil review terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada tahun 2019. Alasan pemilihan indikator ini karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi untuk memberikan layanan kepada pengguna diantaranya pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan evaluasi setiap tahun baik secara mandiri maupun oleh Menpan RB. Pada tahun 2023 melalui penilaian dari Menpan RB diperoleh nilai Indeks SPBE 3,29 sehingga memenuhi bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu 2,55. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Indeks SPBE	2,5	3,29	131,6

Penilaian SPBE dilakukan terhadap 4 domain yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Nilai dari masing-masing domain adalah sebagai berikut :

No	Domain	Indeks
1	Domain Kebijakan SPBE	4,40
2	Domain Tata Kelola SPBE	2,70
3	Domain Manajemen SPBE	1,18
4	Domain Layanan SPBE	4,07
	Indeks SPBE	3,29

Nilai yang dicapai pada tahun 2023 ini menempatkan Banjarnegara termasuk pada kategori baik. Realisasi Nilai Indeks SPBE sudah memenuhi bahkan melampaui dari target yang sudah ditentukan yaitu 2,5. Hal yang sudah dicapai berkaitan dengan SPBE di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah penyusunan Masterplan SPBE, Perda Nomor 50 Tahun 2021 tentang SPBE, Dokumen arsitektur Proses Bisnis dan Dokumen Arsitektur Infrastruktur. Kemudian capaian kinerja di analisis dengan :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Nilai Indeks SPBE	2,5	3,29	131,6

Berdasarkan tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 mencapai 131,6 %.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila realisasi kinerja dan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Indeks SPBE	1,93	100	2,52	109,57	2,42	96,8	2,86	104	3,29	131,6

Meskipun Nilai Indeks SPBE ditetapkan sebagai indikator Sasaran Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2019, namun karena penilaian SPBE sudah dilaksanakan mulai tahun 2018 maka dapat diperbandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih belum mencapai nilai 2,60 yang masuk kategori baik, namun demikian dapat kita lihat Nilai Indeks SPBE pada 2 (tahun) pertama trennya mengalami kenaikan. Penurunan nilai yang dialami oleh hampir semua Instansi Pemerintah Daerah disebabkan adanya penambahan variabel penilaian.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA OPD, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator kinerja	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	%
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	2,5	3,29	131,6

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 dibanding Target adalah 131,6 sehingga sudah bisa melampaui target akhir renstra yaitu 2,5. Artinya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sudah cukup baik dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Namun masih perlu ada upaya yang sistematis agar SPBE di Kabupaten Banjarnegara mencapai tahapan dengan kategori yang SANGAT BAIK.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN;

1. Terdapat payung hukum pelaksanaan SPBE di Banjarnegara yaitu Perda No. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE,
2. Telah disusun Dokumen Arsitektur dan Masterplan SPBE sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPBE.
3. Koordinasi yang baik antara beberapa OPD yang menangani SPBE sesuai dengan bidang tugasnya (ada 24 OPD)
4. Munculya inovasi digitalisasi layanan kepada masyarakat baik yang diinisiasi pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
5. Koordinasi yang baik antar OPD pengampu SPBE;
6. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan OPD se Kabupaten Banjaregara terkait kegiatan e-government yang dilaksanakan;
7. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung terlaksananya kegiatan.

Namun demikian ternyata tetap saja terdapat Permasalahan dalam pencapaian indikator antara lain yaitu :

1. Upaya integrasi antara berbagai aplikasi masih terkendala, disebabkan belum semua aplikasi atau SIM dibangun sesuai standar.
2. Pusat Data Pemerintah (Data Center) yang belum memenuhi standar nasional.
3. Serangan siber pada website dan aplikasi pemerintah.
4. Jumlah dan kapasitas SDM SPBE yang belum mencukupi.

Adapun solusi dalam rangka mengatasi terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Menyusun regulasi yang mengatur pembangunan SIM/aplikasi yang sesuai standar, sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait yang masuk dalam Tim Koordinasi SPBE dalam rangka implementasi SPE sesuai Masterplan SPBE.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan Informatika.
4. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain diluar Pemda)
5. Dukungan Anggaran dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan dan layanan public berbasis elektronik.
6. Pembentukan tim untuk menangani serangan siber;
7. Peningkatan keamanan pada website dan aplikasi Pemda.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1, Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi didukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.073.119.0.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 2.004.160.253,- (95,97%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 68.958.747,- (3,33%), hal ini disebabkan terdapat sisa kontrak/ efisiensi anggaran pada Support TNDE yang hanya dilakukan selama 4 bulan, karena beralih ke aplikasi Srikandi. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%	%	Rp	%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.073.119.000	2.004.160.253	95,97	100	68.958.747	3,33
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.227.002.000	1.224.724.887	99,81	100	2.277.113	0,19

1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.227.002.000	1.224.724.887	99,81	100	2.277.113	0,19
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	846.117.000	779.435.366	92,12	100	66.681.634	7,88
2	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.349.500	7.211.090	77,13	100	2.138.410	22,87
3	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	269.860.000	260.752.460	96,63	100	9.107.540	3,37
4	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	172.650.000	121.977.660	70,65	100	50.672.340	29,35
5	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	394.257.500	389.494.156	98,79	100	4.763.344	1,21

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA. (PADA INDIKATOR SASARAN).

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dicapai melalui 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik
			5. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
			6. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Adapun program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program Aplikasi Informatika dan kegiatannya adalah kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN IKU

SASARAN : MENINGKATNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INDIKATOR : **NILAI INDEKS SPBE**



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,26	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,26	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	2,95	Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,62	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,37	Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,86	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,53	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,07	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,83	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,74	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemalang	2,94	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,63	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,64	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,27	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	3,39	Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,46	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,83	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,29	Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,13	Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	2,80	Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,54	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,19	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	3,70	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	3,70	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,65	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,26	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,35	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,52	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	3,94	Sangat Baik
31	Pemerintah Kota Semarang	3,89	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,26	Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,29	Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,76	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,36	Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	3,74	Sangat Baik

1. Sasaran 2 : " *Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik*", diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : *Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital*, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital	10	29,25%	292,5%

Untuk indikator Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital, kata "Responsibilitas disini kami artikan sebagai tingkat tanggapan/respon/umpan balik dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan Pemerintah melalui media digital (jumlah pengikut). Media digital yang akan kami sampaikan data nya ada yaitu, Instagram, Twitter, Website, Facebook baik milik Pemkab maupun Dinkominfo. Respon dari masyarakat kami artikan sebagai pengunjung/pengikut media digital Pemkab dan Dinkominfo. Adapun formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menerima informasi digital yang ada}}{\text{Jumlah populasi masyarakat yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{308.560}{1.054.804\#} \times 100\% = 29,25\%$$

Jumlah total penduduk adalah jumlah total penduduk per semester 1 pada tahun 2023

Rincian Jumlah pengunjung/pengikut Media Digital yang dikelola Dinkominfo=

1. Youtube Pemkab = 36.590 pengikut
2. Youtube Dinkominfo = 9 pengikut
3. Youtube Radio = 153 pengikut
4. FB Pemkab = 36 pengikut
5. FB Radio = 97 pengikut
6. FB Dinkominfo = 4441 pengikut
7. Twitter Pemkab = 3344 pengikut
8. Twitter Dinkominfo = 74 pengikut
9. IG Pemkab = 23.667 pengikut

- 10. IG Triharso = 1181 pengikut
- 11. IG Radio = 1002 pengikut
- 12. IG Dinkominfo = 2227 pengikut
- 13. Website Pemkab = 230.724 pengunjung
- 14. Website Dinkominfo = 5.015 pengunjung

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 pada Sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital	10%	29,25%	292,5%

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 dibanding Target adalah 29,25% dan sudah melampaui target renstra yaitu 10%. Hal ini menandakan bahwa tingkat respon masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui media digital sudah cukup baik.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Dikarenakan Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Responsibilitas masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital							29,25 %	292,5%
	1 Indikator	-	-	-	-	-	-	29,25 %	292,5%

Berdarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2023, sudah dapat melampaui target.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target s/d 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	9	10
1.	Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital	10%	29,25%	292,5%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Komitmen masih berada pada tingkatan pimpinan, sehingga perlu adanya penguatan komitmen pada tingkatan bawahan;
2. Peran komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra), dan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informatika (SAKA MILENIAL) yang belum optimal dalam rangka diseminasi informasi publik;

Solusi terhadap permasalahan :

1. Penguatan komitmen pada level bawahan.
2. Mendorong KIM, FK Metra, Saka Milenial untuk terus aktif sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi dan mensosialisasikan media digital yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM KIM, FK Metra, dan Saka Milenial sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mitra media pemerintah dalam penyebarluasan informasi, sehingga informasi lebih beragam dan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik, sehingga tingkat responsivitas masyarakat terhadap informasi yang disampaikan meningkat.
5. Memperbanyak inovasi dalam kegiatan penyebarluasan informasi publik, sehingga masyarakat semakin mudah mendapat informasi dan semakin tertarik dengan informasi yang disampaikan.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Didukung dengan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan total anggaran sebesar Rp. 1.206.473.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 1.143.462.421,- (94,78%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 63.010.579,- (5,22%). Hal ini disebabkan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang sedianya akan ada penambahan penyiar ternyata sampai akhir bulan Desember tidak ada penambahan penyiar sehingga anggaran yang sudah dianggarkan di Anggaran

Perubahan tidak terealisasi. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.206.473.000	1.143.462.421	94,78	100	63.010.579	5,22
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.206.473.000	1.143.462.421	94,78	100	63.010.579	5,22
1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	17.976.000	16.958.900	94,34	100	1.017.100	5,66
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	257.567.000	248.967.000	96,66	100	8.600.000	3,34
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	233.420.000	194.912.529	83,50	100	38.507.471	16,50
4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	8.890.000	8.701.000	97,87	100	189.000	2,13
5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	499.983.000	491.001.992	98,20	100	8.981.008	1,80
6	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	71.887.000	67.496.000	93,89	100	4.391.000	6,11
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	116.750.000	115.425.000	98,87	100	1.325.000	1,13

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dicapai melalui 1 (satu) program, 1 kegiatan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
			2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

			3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			4. Pelayanan Informasi Publik
			5. Layanan Hubungan Media
			6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
			7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

LAMPIRAN IKU

SASARAN : PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

**INDIKATOR : TINGKAT RESPONSIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI YANG
DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA DIGITAL**



Subscriber Youtube Radio = 153 pengikut



FB Pemkab = 36 pengikut



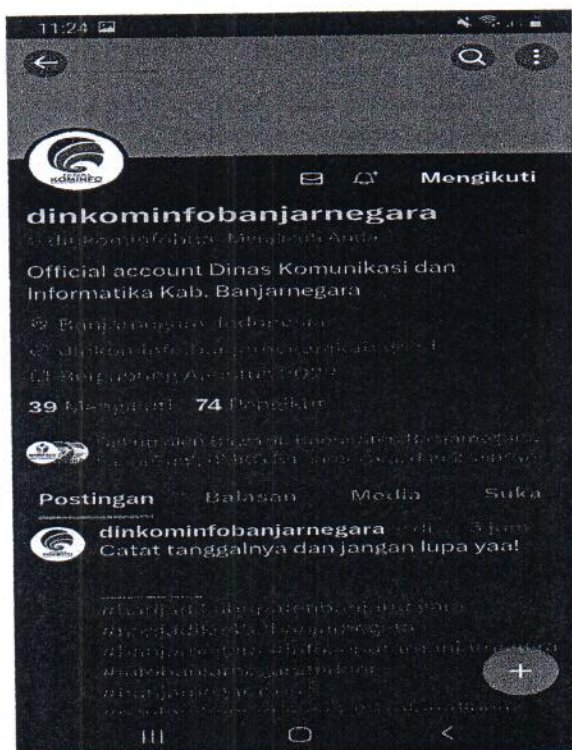
FB Radio = 97 pengikut



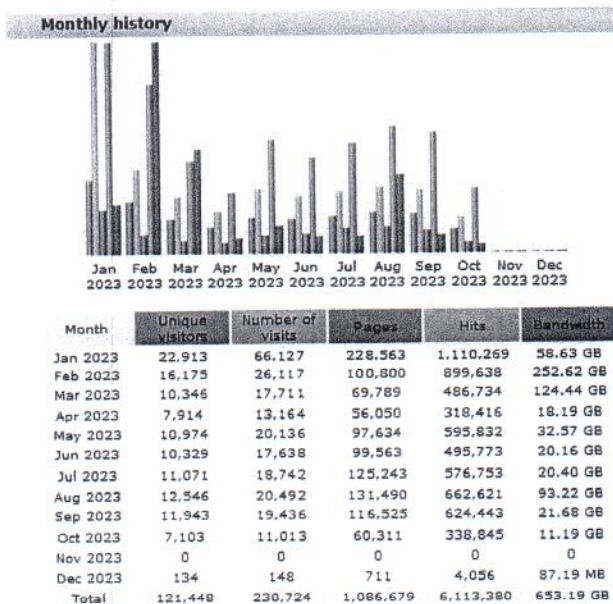
Twitter Pemkab = 3344 pengikut



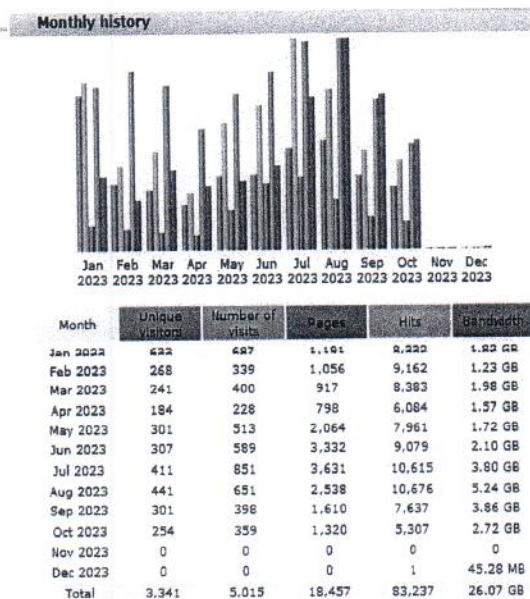
IG Dinkominfo = 2227 pengikut



Twitter Dinkominfo = 74 pengikut



Website Pemkab = 230.724 pengunjung



Website Dinkominfo = 5.015 pengunjung



$$\text{Total} = 153 + 36 + 97 + 3344 + 4441 + 23667 + 1181 + 1002 + 2227 + 74 + 230.724 + 5015 + 9 + 36590 = 308.560$$

Formulasi Pengukuran =

Jumlah masyarakat yang menerima informasi digital yang ada	X 100%
Jumlah populasi masyarakat yang ada	

308.560	X 100% = 29,25%
1.054.804#	

Jumlah total penduduk adalah jumlah total penduduk per semester 1 pada tahun 2023

Agregat Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota		0-4			5-9			10-14		
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Jumlah
1	33.04	BANJARNEGARA	32.840	30.961	63.801	6,05%	42.855	40.267	83.122	7,88%	41.617
Jumlah Total			32.840	30.961	63.801	6,05%	42.855	40.267	83.122	7,88%	41.617
									85.811		85.811
											8,14%
											8,14%

Agregat Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota		15-19			20-24			25-29		
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Jumlah
1	33.04	BANJARNEGARA	34.579	33.758	68.337	6,48%	41.752	40.545	82.297	7,80%	38.190
Jumlah Total			34.579	33.758	68.337	6,48%	41.752	40.545	82.297	7,80%	40.496
									78.686		78.686
											7,46%
											7,46%

Agregat Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota		30-34			35-39			40-44		
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Jumlah
1	33.04	BANJARNEGARA	41.651	39.101	80.752	7,66%	40.575	38.280	78.855	7,48%	42.806
Jumlah Total			41.651	39.101	80.752	7,66%	40.575	38.280	78.855	7,48%	42.806
									83.612		83.612
											7,93%
											7,93%

Agregat Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota		45-49			50-54			55-59		
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Jumlah
1	33.04	BANJARNEGARA	35.895	35.567	71.462	6,77%	33.238	33.612	66.850	6,34%	30.006
Jumlah Total			35.895	35.567	71.462	6,77%	33.238	33.612	66.850	6,34%	30.006
									61.170		61.170
											5,80%
											5,80%

Agregat Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota		60-64			65-69			70-74		
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Jumlah
1	33.04	BANJARNEGARA	25.867	26.142	52.009	4,93%	19.878	19.289	39.167	3,71%	13.886
Jumlah Total			25.867	26.142	52.009	4,93%	19.878	19.289	39.167	3,71%	13.886
									26.782		26.782
											2,54%
											2,54%

Agregat Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota		>= 75				Jumlah			
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Kab./Kota	%
1	33.04	BANJARNEGARA	15.863	16.228	32.091	3,04%	536.381	518.423	1.054.804	100,00%
Jumlah Total			15.863	16.228	32.091	3,04%	536.381	518.423	1.054.804	100,00%

Sasaran 3 : ”*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik*”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : *Laju Pemanfaatan Data Sektoral*, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	10%	100%	1.000%

Indikator Laju Pemanfaatan Data Sektoral baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, Indikator ini memberikan gambaran tentang Persentase OPD dalam menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan. Adapun formulasi pengukurannya adalah Jumlah data sektoral yang tersedia dibagi Jumlah OPD yang menggunakan data sektoral untuk perencanaan pembangunan.

Adapun formulasi Penghitungan Indikator Sasaran digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah data sektoral yang tersedia}}{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data sektoral untuk perencanaan pembangunan}} \times 100\%$$

$$\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 pada Sasaran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas pelayanan data dan statistik	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	10%	100%	1000%

Indikator Laju Pemanfaatan Data Sektoral baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, sehingga tidak bisa diperbandingkan capaian pada tahun- tahun sebelumnya.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 pada Sasaran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas pelayanan data dan statistik	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	10%	100%	1000%

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik dengan 1 Indikator capaiannya 1.000%. Capaian kinerja yang sangat tinggi tersebut disebabkan karena penyediaan data sectoral pada aplikasi satu data sudah tersedia, dan OPD sudah semuanya menggunakan data sectoral tersebut untuk perencanaan pembangunan.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Dikarenakan indikator Laju Pemanfaatan Data Sektoral ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, sehingga belum bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laju Pemanfaatan Data Sektoral							100%	1000%
	1 Indikator								

Berdasarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2023, sudah memenuhi target.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target s/d 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	9	10
1.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	10%	100%	1000%

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang sudah berhasil tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- SDM Pengelola data statistik sektoral di masing masing OPD selaku produsen data yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
- Kurangnya SDM Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sarana Prasarana yang belum memadai dalam penyelenggaraan statistic sektoral;

Solusi terhadap permasalahan :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Statistik
- Kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan BSSN dan OPD terkait ;

Penganggaran kembali pelaksanaan kegiatan yang tertunda.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan di bidang Statistik dan Persandian, yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 72.883.800,- realisasi keuangan sebesar Rp. 68.324.200,- (93,74%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	72.883.800	68.324.200	93,74	100	4.559.600	6,26
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.883.800	68.324.200	93,74	100	4.559.600	6,26
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	46.012.600	42.050.000	91,39	100	3.962.600	8,61
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	11.462.200	11.107.200	96,90	100	355.000	3,10
3	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.409.000	15.167.000	98,43	100	242.000	1,57

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik*, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis

			dan Diseminsai Data Statistik Sektoral
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daeah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
			Membangun Metadata Statistik Sektoral

LAMPIRAN IKU

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DATA DAN STATISTIK

INDIKATOR : LAJU PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL


Lampiran IKK Outcome 20.2.s.1.a Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

No	NAMA OPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) <ul style="list-style-type: none"> - BAGIAN PEMERINTAHAN - BAGIAN HUKUM - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM - BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - BAGIAN ORGANISASI - BAGIAN UMUM
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SETWAN)
3.	INSPEKTORAT
4.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPPA)
5.	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISTANKAN DAN KP)
6.	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINDIKPORA)
7.	DINAS KESEHATAN (DINKES)
8.	DINAS PERHUBUNGAN (DINHUB)
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL)
10.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD)
11.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
12.	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISPERINDAGKOP UKM)
13.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISARPUS)
14.	DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DISNAKER PMPTSP)
15.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPKPLH)
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO)
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISPERMADES PPKB)
18.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
19.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG)
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
21.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
22.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
25.	KECAMATAN SUSUKAN
26.	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
27.	KECAMATAN MANDIRAJA
28.	KECAMATAN PURWANEGARA
29.	KECAMATAN BAWANG
30.	KECAMATAN BANJARNEGARA
31.	KECAMATAN PAGEDONGAN
32.	KECAMATAN SIGALUH
33.	KECAMATAN MADUKARA
34.	KECAMATAN BANJARMANGU
35.	KECAMATAN WANADADI
36.	KECAMATAN PUNGCELAN
37.	KECAMATAN RAKIT
38.	KECAMATAN KARANGKOBAR
39.	KECAMATAN WANAYASA
40.	KECAMATAN KALIBENING
41.	KECAMATAN PANDANARUM
42.	KECAMATAN PEJAWARAN
43.	KECAMATAN PAGENTAN
44.	KECAMATAN BATUR

Sumber Data : Dinkominfo

Banjarnegara, 10 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara



DINKOMINFO

Dr. SETYA ADI PRABAYUWANA


Pembina Tk. I

NIP. 196005071999031005

Lampiran IKK Outcome 20.2.s.2.b Jumlah PD

No	NAMA OPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) <ul style="list-style-type: none">- BAGIAN PEMERINTAHAN- BAGIAN HUKUM- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM- BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA- BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN- BAGIAN ORGANISASI- BAGIAN UMUM
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SETWAN)
3.	INSPEKTORAT
4.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPPA)
5.	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISTANKAN DAN KP)
6.	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DINDIKPORA)
7.	DINAS KESEHATAN (DINKES)
8.	DINAS PERHUBUNGAN (DINHUB)
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL)
10.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD)
11.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
12.	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISPERINDAGKOP UKM)
13.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISARPUS)
14.	DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DISNAKER PMPTSP)
15.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPKPLH)
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO)
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISPERMADES PPKB)
18.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
19.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG)
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
21.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
22.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
25.	KECAMATAN SUSUKAN
26.	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
27.	KECAMATAN MANDIRAJA
28.	KECAMATAN PURWANEGARA
29.	KECAMATAN BAWANG
30.	KECAMATAN BANJARNEGARA
31.	KECAMATAN PAGEDONGAN
32.	KECAMATAN SIGALUH
33.	KECAMATAN MADUKARA
34.	KECAMATAN BANJARMANGU
35.	KECAMATAN WANADADI
36.	KECAMATAN PUNGCELAN
37.	KECAMATAN RAKIT
38.	KECAMATAN KARANGKOBAR
39.	KECAMATAN WANAYASA
40.	KECAMATAN KALIBENING
41.	KECAMATAN PANDANARUM
42.	KECAMATAN PEJAWARAN
43.	KECAMATAN PAGANTAN
44.	KECAMATAN BATUR

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

Banjarnegara, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Banjarnegara

Ir. SETYA ADI PRABAYUWANA
Rembina Tk. I
NIP. 19660507 199903 1 005



INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA

Umur Harapan Hidup
Saatlahir

Tahun 2022



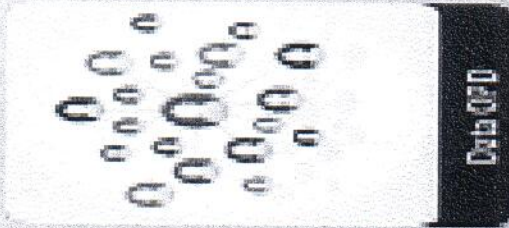
68,61



71.77

Rata-Rata Lama

Sekolah 10%



Data OPD



IKU



IKK

Data OPD pada Aplikasi satu data.

Sasaran 4 :	Meningkatnya Keamanan informasi dalam mendukung SPBE
-------------	--

Sasaran 4 : ”*Meningkatnya Keamanan informasi dalam mendukung SPBE*”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi	56,82%	100%	175,99%

Indikator Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, Persentase ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan informasi yang diperlukan. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak jumlah OPD yang mencapai tingkat keamanan informasi yang baik, menunjukkan komitmen dan upaya dalam melindungi data dan informasi yang mereka tangani. Aplikasi surat dinas elektronik (Aplikasi Srikandi) yang digunakan oleh semua OPD dan beberapa instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi sasaran pertama yang akan diamankan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan surat dinas di lingkungan Pemkab oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemudian dengan sudah terselenggaranya sosialisasi keamanan informasi di seluruh OPD hingga Kecamatan dan Kelurahan terkait pengamanan informasi melalui TTE.

Pengamanan informasi aplikasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 yakni penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 6 (enam) aplikasi, yakni Aplikasi JITU (Pelayanan Satu Pintu Terpadu) pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, aplikasi OSS pada Disnaker PMPTSP, Aplikasi Layanan Kependudukan (SIK) pada Dindikcapil, Aplikasi SISMIOP dan SIMPATDA pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Aplikasi Srikandi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Adapun formulasi pengukuran dari indikator Persentase OPD yang melakukan/menerapkan keamanan informasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah melakukan pengamanan aplikasi}}{\text{Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Banjarnegara}} \times 100\%$$

44 OPD

44 OPD X 100% = **100%**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 pada Sasaran 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase OOPD yang Menerapkan Keamanan Informasi	56,82%	100%	175,99

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran 4 yaitu Meningkatkan Keamanan Informasi yang mendukung SPBE dengan 1 Indikator capaiannya 175,99%. Capaian Kinerja dari sasaran tersebut dikarenakan aplikasi tanda tangan elektronik (TTE) yang sedianya akan dilaksanakan untuk beberapa OPD, ternyata bisa dilaksanakan untuk seluruh OPD.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Dikarenakan Persentase OPD yang menerapkan Keamanan Informasi ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, sehingga belum bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi							100%	175,99 %
	1 Indikator	-	-	-	-		-		

Berdasarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2023, sudah memenuhi bahkan melampaui target.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target s/d 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	9	10
1.	Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi	56,82%	100%	175,99%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja keberhasilan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM di bidang Persandian;
2. Kompetensi SDM persandian yang masih kurang;
3. Sistem Keamanan Informasi yang belum terbangun;
4. Penilaian Indeks KAMI secara mandiri belum selasai

Solusi terhadap permasalahan :

1. Penambahan SDM Persandian;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang persandian dan telekomunikasi;
3. Kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan BSSN dan OPD terkait ;
4. Masih banyak dokumen yang harus dikumpulkan untuk data dukung penilaian Indek KAMI

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan di di bidang Statistik dan Persandian, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 70.726.900,- realisasi keuangan sebesar Rp. 69.022.000,- (97,59%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	70.726.900	69.022.000	97,59	100	1.704.900	2,41
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.726.900	69.022.000	97,59	100	1.704.900	2,41
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	64.556.900	62.983.450	97,56	100	1.573.450	2,44
2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000	6.038.550	97,87	100	131.450	2,13

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN IKU

SASARAN : MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG SPBE

INDIKATOR : **PERSENTASE OPD YANG MENERAPKAN KEAMANAN INFORMASI**

Jumlah OPD yang menerapkan keamann informasi (Tandatangan elektronik pada Aplikasi Srikandi)

No	NAMA OPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)
	- BAGIAN PEMERINTAHAN
	- BAGIAN HUKUM
	- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	- BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
	- BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	- BAGIAN ORGANISASI
	- BAGIAN UMUM
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SETWAN)
3.	INSPEKTORAT
4.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPPA)
5.	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISTANKAN DAN KP)
6.	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DINDIKPORA)
7.	DINAS KESEHATAN (DINKES)
8.	DINAS PERHUBUNGAN (DINHUB)
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL)
10.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD)
11.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
12.	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISPERJNDAGKOP UKM)
13.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISARPUS)
14.	DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DISNAKER PMPTSP)
15.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPKPLH)
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO)
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISPERMADES PPKB)
18.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
19.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG)
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
21.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
22.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
25.	KECAMATAN SUSUKAN
26.	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
27.	KECAMATAN MANDIRAJA
28.	KECAMATAN PURWANEGARA
29.	KECAMATAN BAWANG
30.	KECAMATAN BANJARNEGARA
31.	KECAMATAN PAGEDONGAN
32.	KECAMATAN SIGALUH
33.	KECAMATAN MADUKARA
34.	KECAMATAN BANJARMANGU
35.	KECAMATAN WANADADI
36.	KECAMATAN PUNGCELAN
37.	KECAMATAN RAKIT
38.	KECAMATAN KARANGKOBAR
39.	KECAMATAN WANAYASA
40.	KECAMATAN KALIBENING
41.	KECAMATAN PANDANARUM
42.	KECAMATAN PEJAWARAN
43.	KECAMATAN PAGENTAN
44.	KECAMATAN BATUR

Sumber Data : Dinkominfo

Jumlah Perangkat Daerah

No	NAMA OPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) - BAGIAN PEMERINTAHAN - BAGIAN HUKUM - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM - BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - BAGIAN ORGANISASI - BAGIAN UMUM
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SETWAN)
3.	INSPEKTORAT
4.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPPA)
5.	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISTANKAN DAN KP)
6.	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DINDIKPORA)
7.	DINAS KESEHATAN (DINKES)
8.	DINAS PERHUBUNGAN (DINHUB)
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL)
10.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD)
11.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
12.	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISPERINDAGKOP UKM)
13.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISARPUS)
14.	DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DISNAKER PMPTSP)
15.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPKPLH)
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO)
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISPERMADES PPKB)
18.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
19.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG)
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
21.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
22.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
25.	KECAMATAN SUSUKAN
26.	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
27.	KECAMATAN MANDIRAJA
28.	KECAMATAN PURWANEGARA
29.	KECAMATAN BAWANG
30.	KECAMATAN BANJARNEGARA
31.	KECAMATAN PAGEDONGAN
32.	KECAMATAN SIGALUH
33.	KECAMATAN MADUKARA
34.	KECAMATAN BANJARMANGU
35.	KECAMATAN WANADADI
36.	KECAMATAN PUNGCELAN
37.	KECAMATAN RAKIT
38.	KECAMATAN KARANGKOBAR
39.	KECAMATAN WANAYASA
40.	KECAMATAN KALIBENING
41.	KECAMATAN PANDANARUM
42.	KECAMATAN PEJAWARAN
43.	KECAMATAN PAGENTAN
44.	KECAMATAN BATUR

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

Sasaran 5 : ” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ”,

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “*Nilai Survey Kepuasan Masyarakat*”. Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat. Formulasi pengukurannya adalah **membandingkan antara Total nilai persepsi per unsur dibagi dengan Total unsur yang terisi**. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	84	84,39	100,46

Indikator Kinerja yang mendukung meningkatnya survey kepuasan masyarakat dapat kami ilustrasikan sebagai berikut :

- 1) Indikator ke 1 (satu) yaitu Nilai Survey Kpuasan Masyarakat pada tahun 2023 diperoleh nilai 84,39 dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1.	Persyaratan	3,128
2.	Prosedur	3,077
3.	Waktu Pelayanan	3,026
4.	Biaya / Tarif	3,872
5.	Produk Layanan	3,000
6.	Kompetensi Pelaksana	4,000
7.	Perilaku Pelaksana	3,949
8.	Penanganan Pengaduan	3,333
9.	Kenyamanan Tempat Layanan	3,026

Pada tabel tersebut diatas diperoleh nilai indeks untuk pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 3,379 dan setelah dikonversikan dengan nilai nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 84,39. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di Kantor Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah **BAIK..** Namun dari 9 unsur penilaian

yang hasilnya kurang memuaskan adalah dari unsur Produk Layanan (Sarana dan Prasarana).

Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat memenuhi target nilai 84,39 namun masih perlu peningkatan pelayanan khususnya pada unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perlu disederhanakan sehingga memudahkan bagi pengguna layanan.
 2. Prosedur pelayanan. Tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan untuk lebih disederhanakan.
 3. Waktu pelayanan. Jangka waktu yang diperlukan untuk setiap menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan untuk lebih diefisiensikan waktunya.
 4. Produk Pelayanan. Produk pelayanan yang di hasilkan untuk dievaluasi agar lebih tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 5. Kenyamanan Tempat layanan. Belum tersedianya tempat layanan yang representatif disebabkan masih menumpang di gedung secretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
 6. Fasilitas tempat tunggu. Belum tersedianya tempat tunggu yang representatif disebabkan masih menumpang di gedung sekretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk Dinas Komunikasi dan Informatika
 7. Perilaku pelaksana. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan lebih baik lagi bagi pengguna layanan.
 8. Maklumat Pelayanan. Komitmen untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart masih perlu ditingkatkan.
 9. Penanganan Pengaduan. Penanganan pengaduan dan tindak lanjut masih perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi agar pengaduan tersebut bisa segera tertangani.
2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Indikator Kinerja		2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	7	8	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,23	102,82 %	83,72	105,97 %	83,75	106,01 %	83,80	104,75 %	84,39	100,46

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2023	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	84,39	100,46%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2023 untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Nilai 84,39 telah terlampaui pada Tahun 2023 ini.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan OPD/SKPD beserta instansi terkait;
2. Komitmen dari aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung karena belum ada gedung kantor dan peralatan yang memadai
2. Kurangnya SDM khususnya di bidang teknis IT, programmer dan jaringan, SDM persandian dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai sesuai unsur pelayanan;
2. Penambahan SDM dan peningkatan SDM di bidang IT.

Kesimpulan (diambil dari laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. IKM unit pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar : 84,39 (Kategori B) ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sudah ideal dengan predikat atau tingkatan PUAS.
2. Bahwa pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah baik, namun demikian masyarakat / pengguna layanan berharap lebih ditingkatkan lagi.
3. Pelayanan informasi terkadang membutuhkan lama, hal ini terkait dengan jaringan IT yang kadang mengalami kendala.

REKOMENDASI (diambil dari laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara) sebagai berikut :

1. Untuk dapat lebih maksimal dalam pelayanan maka sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika diberi sarana dan prasarana layanan publik tersendiri (Gedung dan sarana prasarana penunjang lainnya).
2. Dalam rangka mewujudkan komitmen public kearah yang lebih baik, maka survey tentang opini publik dalam hal kepuasan masyarakat atas Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika akan dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, didukung oleh 1 program, 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan di Sekretariat. Program yang mendukung capaian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 4.739.223.688,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 4.628.687.792 (97,66%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 110.535.896,- (2,33%). Hal ini disebabkan perhitungan atas antisipasi kekurangan gaji ASN dan kenaikan tambahan penghasilan ASN. Namun sampai dengan akhir tahun 2023, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap prosentase penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.739.223.688	4.628.687.792	97,67	100	110.535.896	2,33
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.739.223.688	4.628.687.792	97,66	100	110.535.896	2,33
1	Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.813.369.089	3.727.708.666	97,75	100	85.660.423	2,25
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.000.000	92.000.000	100	100	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.475.000	266.779.036	97,91	100	5.695.964	2,09
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	8.884.400	98,72	100	115.600	1,28
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.475.000	227.894.636	97,61	100	5.580.364	2,39
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	100	100	0	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.145.599	249.430.990	94,07	100	15.714.609	5,93
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	46.656.981	84,43	100	8.343.019	15,17
7	Sub Kegiatan	210.145.599	202.774.009	96,49	100	7.371.590	3,51

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.624.000	206.380.000	99,40	100	1.244.000	0,60
8	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	33.118.000	32.630.000	98,53	100	488.000	1,47
9	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.506.000	173.750.000	99,57	100	756.000	0,43
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.610.000	86.389.100	97,49	100	2.220.900	2,51
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	56.030.000	54.931.000	98,04	100	1.099.000	1,96
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000	14.853.100	95,21	100	746.900	4,79
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.980.000	16.605.000	97,79	100	375.000	2,21

6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 5 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, didukung dengan* melalui 1 (satu) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

			Keuangan SKPD
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
			1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat yang memperoleh pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan survey kepuasan yaitu seluruh OPD dan Instansi terkait.

LAMPIRAN IKU

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

INDIKATOR : **NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	3	3	3	4	4	4	3
2	3	3	2	4	3	4	4	2	3
3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
4	3	3	3	4	3	4	4	4	3
5	3	4	3	4	3	4	4	4	3
6	3	4	3	4	3	4	4	4	3
7	4	3	3	4	3	4	4	2	3
8	3	3	3	4	3	4	4	4	3
9	3	3	3	4	3	4	4	2	3
10	3	3	3	4	3	4	4	4	3
11	3	3	3	4	3	4	4	2	3
12	4	3	3	4	3	4	4	4	3
13	3	3	3	4	3	4	4	2	3
14	3	3	3	3	3	4	4	4	3
15	3	3	3	4	3	4	4	4	3
16	3	3	4	4	3	4	4	4	3
17	3	3	3	4	3	4	4	4	3
18	3	3	3	4	3	4	4	4	3
19	3	3	4	3	3	4	4	2	3
20	3	3	3	4	3	4	4	4	3
21	3	3	3	3	3	4	4	2	3
22	3	3	3	4	3	4	4	2	3
23	3	3	3	4	3	4	4	2	3
24	3	4	3	4	3	4	4	2	3
25	4	3	3	4	3	4	4	4	2
26	3	3	3	4	3	4	4	2	3
27	3	3	3	4	3	4	4	2	3
28	3	3	3	4	3	4	4	2	3
29	3	3	3	4	3	4	4	2	3
30	3	3	3	4	3	4	4	2	3
31	3	3	3	4	3	4	4	4	4
32	3	3	3	4	3	4	4	4	4
33	3	3	3	4	3	4	4	4	3

34	4	3	3	4	3	4	4	4	3
35	3	3	3	4	3	4	4	4	3
36	4	3	3	4	3	4	2	4	3
37	3	3	3	4	3	4	4	4	3
38	3	3	3	4	3	4	4	4	3
39	3	3	3	4	3	4	4	4	3
ΣNilai /Unsur	122	120	118	151	117	156	154	130	118
NRR / Unsur	3,128	3,077	3,026	3,872	3,000	4,000	3,949	3,333	3,026
NRR tertbg/ unsur	0,347	0,342	0,336	0,430	0,333	0,444	0,438	0,370	0,336
*)									
3,376									
**)									
IKM Unit pelayanan									
84,388									

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,128
U2	Prosedur	3,077
U3	Waktu pelayanan	3,026
U4	Biaya/tarif	3,872
U5	Produk layanan	3,000
U6	Kompetensi pelaksana	4,000
U7	Perilaku pelaksana	3,949
U8	Penanganan Pengaduan	3,333
U9	Sarana dan Prasarana	3,026

IKM UNIT PELAYANAN :	84,39
-----------------------------	--------------

- Mutu Pelayanan :
- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
 - B (Baik) : 76,61 - 88,30
 - C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
 - D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Sasaran 6 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran 6 : ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ”. Indikator ini dipilih untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan formulasi pengukuran yaitu Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Adapun hasil penilaian SAKIP pada tahun 2023 sebagai berikut :

Pada tahun 2023 memperoleh nilai dari 69,40 dengan pencapaian masing-masing komponen penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian
1.	Perencanaan kinerja	30%	20,70
2.	Pengukuran kinerja	30%	20,10
3.	Pelaporan kinerja	15%	11,10
4.	Evaluasi internal	10%	17,50
Penilaian		100%	69,40

Pada tabel tersebut diatas setelah dikonversi diperoleh nilai sebesar 69,40 dengan kategori B.

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Nilai SAKIP OPD	61,00	69,40	113,77
	Kategori	B	B	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah 61,00 (Kategori B), dari hasil Penilaian Tim Sakip Kabupaten Banjarnegara memperoleh Nilai sebesar 69,40 dengan kategori B.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Indikator Kinerja		2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	5	6	7	8	5	6	7	8	10	11	12
1	Nilai SAKIP OPD	55,03 B	91,70	62,69 B	104,47	60,30 B	101,48	66,36 B	110,60	61,00 B	113,77

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	61,00	69,40	113,77%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2023 untuk Nilai SAKIP OPD sebesar 61,00 dengan Kategori B, sedangkan pada Tahun 2023 ini telah mencapai nilai 69,40 sehingga sudah melampaui target Renstra 2023.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Sekretariat sebagai penyusun dan pengumpul data SAKIP dengan bidang-bidang ;
2. Komiten dari Pimpinan dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.

Permasalahan dalam pencapaian indikator

1. Belum terdokumentasi dengan baik data-data yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP;
2. Kompetensi SDM dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.

3. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.
4. Pengukuran Kinerja belum dapat dijadikan sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
5. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
6. Dokumen Laporan Kinerja belum di reviu secara optimal pada setiap jenjangnya.
7. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Penertiban data perencanaan dan evaluasi kinerja;
2. Peningkatan kompetensi SDM perencana.
3. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mendukung capaian kinerja sesuai standar
4. Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
5. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja yang direncanakan
6. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, serta melakukan penyelarasan antara dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja
7. Dokumen laporan kinerja di reviu secara memadai
8. Menyusun dokumen kinerja sesuai standar, yang menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
9. Informasi kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.
10. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
11. Evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja dan sesuai standar secara memadai.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 6, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan di Sekretariat. Program yang mendukung capaian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 12.821.200,- (98,62%) dan realisasi fisik sebesar 100%, Jumlah anggaran yang sangat kecil dan hanya diperuntukkan makan minum rapat penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Efisiensi didapatkan dari pemanfaatan anggaran yang kecil tersebut untuk tetap memenuhi target kinerja 100 %, yaitu tersusunnya dokumen perencanaan 7 dokumen dan dokumen pelaporan sebanyak 7 dokumen. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000	12..821.200	98,62		178.800	1,38
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12..821.200	98,62		178.800	1,38
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.895.950	98,70	100	104.050	1,30
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.925.250	98,51	100	74.750	1,49

6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 6 : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, didukung dengan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :*

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		Perangkat Daerah	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
--	--	------------------	--

Nilai SAKIP OPD diperoleh dari evaluasi oleh Inspkedorat atas SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Evaluasi ini dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal. Hasil Evaluasi dengan nilai 69,40 dengan kategori **B atau Baik** dengan interprestasi Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan masih perlu adanya perbaikan.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Akuntabilitas bidang keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran.

Untuk alokasi anggaran Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 647.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 747.365.419,- anggaran sudah melampaui target sebesar Rp. 100.365.419,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan	Surplus/ Defisit	%
1.	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunik asi	517.000.000	666.915.426	149.915.426	115,51
2.	Hasil Kerja Sama Daerah	130.000.000	76.441.000	-53.559.000	58,80
3.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0	4.008.993	4.008.993	
Jumlah		647.000.000	747.365.419	100.365.419	115,51

Untuk membiayai operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 mendapat anggaran sebesar Rp. 9.260.273.672,- , kemudian berkurang sebesar Rp. 616.145.687 pada refocussing pertama menjadi Rp. 8.644.127.985,- , lalu mengalami pengurangan lagi sebesar Rp. 721.627.417,- sehingga anggaran menjadi Rp. 7.922.500.568,- dan pada anggaran perubahanmendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 252.925.820,- sehingga menjadi Rp. 8.175.426.388,- . Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 7.926.477.866,- atau sebesar 96,95 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.752.223.688	4.641.508.992	97,55
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.206.473.000	1.143.462.421	94,78
3	Program Aplikasi Informatika	2.073.119.000	2.004.160.253	95,97
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	72.883.800	68.324.200	93,74
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	70.726.900	69.022.000	97,59
	Jumlah	8.175.426.388	7.926.477.866	96,95

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.821.200	98,62
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.895.950	98,70
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.925.250	98,51
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.905.369.089	3.819.708.666	97,81
3	Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.813.369.089	3.727.708.666	97,75

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.000.000	92.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.475.000	266.779.036	97,91
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	8.884.400	98,72
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.475.000	227.894.636	97,61
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.624.000	206.380.000	99,40
8	Pengadaan Mebel	33.118.000	32.630.000	98,53
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.506.000	173.750.000	98,57
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.145.599	249.430.990	94,07
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	46.656.981	84,83
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.145.599	202.774.009	96,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.610.000	86.389.100	97,49
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	56.030.000	54.931.000	98,04
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000	14.853.100	95,21
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.980.000	16.605.000	97,79
	JUMLAH	4.752.223.688	4.641.508.992	97,55

Total anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 4.752.223.688,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.641.508.992,- . Realisasi keuangan yang sebesar 97,55% ini disebabkan karena belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak maksimal terserap dikarenakan perhitungan atas antisipasi kekurangan gaji ASN, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap persentase penyerapan anggaran. Disamping itu terdapat penambahan anggaran untuk antisipasi terjadinya kekurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena ada penambahan/ Pembangunan gardu listrik (shelter)

Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) Banjarnegara agar siaran radio bisa di terima di wilayah yg lebih luas

Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.206.473.000	1.143.462.421	94,78
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	17.976.000	16.958.900	94,34
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	257.567.000	248.967.000	96,66
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	233.420.000	194.912.529	83,50
4	Pelayanan Informasi Publik	8.890.000	8.701.000	97,87
5	Layanan Hubungan Media	499.983.000	491.001.992	98,20
6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	71.887.000	67.496.000	93,89
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	116.750.000	115.425.000	98,87
	JUMLAH	1.206.473.000	1.143.462.421	94,78

Total anggaran program Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 1.206.473.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.143.462.421,- Realisasi keuangan yang sebesar 94,78% ini disebabkan karena pada Belanja jasa tenaga pelayanan umum pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada anggaran perubahan direncanakan akan menambah tenaga penyiar, sehingga ditambahkan sebanyak rencana penambahan tenaga tersebut tetapi sampai bulan Desember tahun 2023 tidak terlaksana penambahan tenaga.

Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.227.002.000	1.224.724.887	99,81
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.227.002.000	1.224.724.887	99,81
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	846.117.000	779.435.366	92,12
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.349.500	7.211.090	77,13
3	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	269.860.000	260.752.460	96,63
4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	172.650.000	121.977.660	70,65
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	394.257.500	389.494.156	98,79
	JUMLAH	2.073.119.000	2.004.160.253	95,97

Program Aplikasi Informatika Total anggaran sebesar Rp. **2.073.119.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **2.004.160.253,-** . Realisasi keuangan yang hanya sebesar 95,97% ini disebabkan karena pada Sub Kegiatan Anggaran tidak terserap pada sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di karenakan pada saat penagihan piutang Menara telekomunikasi tahap ke dua di serahkan secara langsung kepada pemilik menara pada saat melakukan penagihan retribusi Menara sehingga sebagian tidak mengirimkan dokumen melalui pos. hal tersebut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2022 di sub kiatan ini. Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah di karenakan efisiensi anggaran pada kontrak kerja Support TNDE yang hanya dilakukan selama

4 bulan, karena masa peralihan dari TNDE ke aplikasi Srikandi (sesuai Kemenpan RB Nomor 679 tahun 2020 tentang AUBKD seluruh instansi pemerintah harus menggunakan aplikasi SRIKANDI sehingga mulai Oktober 2022-April 2023 merupakan masa peralihan penggunaan aplikasi TNDE ke Srikandi).

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.883.800	68.324.200	93,74
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	46.012.600	42.050.000	91,39
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	11.462.200	11.107.200	96,90
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.409.000	15.167.000	98,43
	JUMLAH	72.883.800	68.324.200	93,74

Total anggaran program ini sebesar Rp 72.883.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 68.324.200,- atau sebesar 93,74%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan adanya efisensi anggaran.

Program Penyelenggaraan Persaandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.726.900	69.022.000	97,59

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	64.556.900	62.983.450	97,56
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000	6.038.550	97,87
JUMLAH	70.726.900	69.022.000	97,59

Total anggaran program ini sebesar Rp 70.726.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 69.022.000,- atau sebesar 97,59%. Realisasi anggaran yang tidak tercapai hingga 100% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LKjIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

LAMPIRAN IKU

SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

INDIKATOR : NILAI SAKIP OPD



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INSPEKTORAT

Jalan Dipayuda Nomor : 10 Telp. (0286) 591459, 591084

BANJARNEGARA 53415

e-mail : inspektorat@banjarnegarakab.go.id

Nomor : 700/64/LHE/Insp/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Banjarnegara, 31 Juli 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Banjarnegara

di -

BANJARNEGARA

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022. Evaluasi kami lakukan berdasarkan standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang dianggap perlu, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 090/102-ST/Insp/2023 tanggal 2 Mei 2023 untuk melaksanakan evaluasi AKIP Tahun 2022 Tahap II pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja”.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	20,70
B	Pengukuran Kinerja	30%	20,10
C	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
D	Evaluasi Internal	25%	17,50
Penilaian		100%	69,40

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “20,70” dari target sebesar 30 atau 69%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Renstra perangkat daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018;
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 telah tersedia, yaitu Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja. Dokumen tersebut telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara bahwa:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, yaitu :
 - a) Penetapan Indikator dan Target yang berbeda antar dokumen perencanaan, sehingga belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
 - b) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum disajikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
- 2) Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.

b. Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “20,10” dari target sebesar 30 atau 67%, dengan kondisi:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan dan terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

- b) Menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan standar, yang menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja. menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- c) Informasi kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.

4) Evaluasi Akuntabilitas Internal

Hal-hal pokok yang diperlukan dalam Evaluasi Akuntabilitas Internal yaitu dengan:

- a) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- b) Evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja dan sesuai standar secara memadai.

3. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA


Drs. AGUNG YUSIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 199203 1 002

BAB IV PENUTUP

Secara umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara pada tahun anggaran 2023, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis serta 6 (enam) Indikator Kinerja, sudah cukup baik. Dengan perincian Capaian sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Indeks SPBE**, dengan target 2,5 terealisasi 3,29 sehingga Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 131,6 persen ;
2. Sasaran strategis yang ke dua yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik*, dengan Indikator Kinerja : *Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital*, dengan target 10% terealisasi 29,25%, sehingga Capaian Kinerjanya 293,5 persen
3. Sasaran strategis yang ketiga yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik*, dengan Indikator Kinerja : **Laju Pemanfaatan Data Sektoral**, dengan target 10%. Tahun 2023 melalui perbandingan antara Data pengunjung di tahun dasar, dibandingkan dengan jumlah pengunjung di tahun 2023, target ini dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaiannya kinerjanya adalah 1.000%.
4. Sasaran strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE*, dengan Indikator Kinerja : **Persentase OPD yang menerapkan Keamanan Informasi**, dengan target 56,82%. Tahun 2023 melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi surat menyurat Srikandi di seluruh OPD target ini dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaiannya kinerjanya adalah 175,99%.
5. Sasaran strategis yang kelima yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dengan target nilai 84 tercapai nilai 84,39 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,46 persen;
6. Untuk sasaran strategis yang keenam yaitu : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai SAKIP OPD** dengan target 61,00 dan predikat kategori B. Target tersebut di tahun 2023 bisa tercapai dengan nilai di 69,40, sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai adalah 113,77 persen.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, rata-rata telah mencapai target-target yang telah ditetapkan/direncanakan, hal ini disebabkan :

- a. pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan terarah, sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan ditopang oleh alokasi anggaran yang ada.

- b. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di Sekretariat dan 3 (tiga) bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika, ini sangat mendukung peningkatan kualitas layanan public.

Meskipun target sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator-indikator sasaran, antara lain :

- a. Upaya integrasi antara berbagai aplikasi masih terkendala, disebabkan belum semua aplikasi atau SIM dibangun sesuai standar.
- b. Pusat Data Pemerintah (Data Center) yang belum memenuhi standar nasional.
- c. Serangan siber pada website dan aplikasi pemerintah.
- d. Jumlah dan kapasitas SDM SPBE yang belum mencukupi.
- e. Komitmen masih berada pada tingkatan pimpinan, sehingga perlu adanya penguatan komitmen pada tingkatan bawahan;
- f. Peran komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra), dan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informatika (SAKA MILENIAL) yang belum optimal dalam rangka diseminasi informasi publik
- g. SDM Pengelola data statistik sektoral di masing masing OPD selaku produsen data yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya
- h. Kurangnya SDM Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
- i. Sarana Prasarana yang belum memadai dalam penyelenggaraan statistic sektoral
- j. Masih kurangnya SDM di bidang Persandian;
- k. Kompetensi SDM persandian yang masih kurang;
- l. Sistem Keamanan Informasi yang belum terbangun;
- m. Penilaian Indeks KAMI secara mandiri belum selesai
- n. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung karena belum ada gedung kantor dan peralatan yang memadai
- o. Belum terdokumentasi dengan baik data-data yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP;
- p. Kompetensi SDM dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.
- q. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.
- r. Pengukuran Kinerja belum dapat dijadikan sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- s. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- t. Dokumen Laporan Kinerja belum di reviu secara optimal pada setiap jenjangnya.

- u. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun regulasi yang mengatur pembangunan SIM/aplikasi yang sesuai standar, sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait yang masuk dalam Tim Koordinasi SPBE dalam rangka implementasi SPE sesuai Masterplan SPBE.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan Informatika.
4. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain diluar Pemda)
5. Dukungan Anggaran dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan dan layanan public berbasis elektronik.
6. Pembentukan tim untuk menangani serangan siber;
7. Peningkatan keamanan pada website dan aplikasi Pemda.
8. Penguatan komitmen pada level bawahan.
9. Mendorong KIM, FK Metra, Saka Milenial untuk terus aktif sebagai mitra dalam penyebaran informasi dan mensosialisasikan media digital yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
10. Melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM KIM, FK Metra, dan Saka Milenial sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas.
11. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mitra media pemerintah dalam penyebaran informasi, sehingga informasi lebih beragam dan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik, sehingga tingkat responsivitas masyarakat terhadap informasi yang disampaikan meningkat.
12. Memperbanyak inovasi dalam kegiatan penyebaran informasi publik, sehingga masyarakat semakin mudah mendapat informasi dan semakin tertarik dengan informasi yang disampaikan.
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Statistik
14. Kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan BSSN dan OPD terkait
15. Penambahan SDM Persandian;
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang persandian dan telekomunikasi;
17. Kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan BSSN dan OPD terkait ;
18. Masih banyak dokumen yang harus dikumpulkan untuk data dukung penilaian Indek KAMI
19. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai sesuai unsur pelayanan;
20. Penambahan SDM dan peningkatan SDM di bidang IT


21. Penertiban data perencanaan dan evaluasi kinerja;
22. Peningkatan kompetensi SDM perencana.
23. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mendukung capaian kinerja sesuai standar
24. Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang bersesinambungan
25. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja yang direncanakan
26. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, serta melakukan penyesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja
27. Dokumen laporan kinerja di reviu secara memadai
28. Menyusun dokumen kinerja sesuai standar, yang menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
29. Informasi kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.
30. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
31. Evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja dan sesuai standar secara memadai.

Sebagai kata penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yakni bahwa Tim Kerja kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang ada guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.

Namun demikian apabila dalam penyusunan LKjIP ini dipandang masih terdapat kekurangan kami menerima saran masukan dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini kami buat semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 26 Februari 2024

PI. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ir. SETYA ADI PRABAYUWANA
NIP. 19660507 199903 1 005

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- 2) Format LKJIP;

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

2. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH, MH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Jabatan : Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. BANJARNEGARA

R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH, MH

Pembina Tk. I/IV/b

* NIP. 19640217 198607 1 001


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Digitalisasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara		
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE	2,5
2.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Responsibilitas Masyarakat Terhadap Informasi Melalui Media Digital	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	10%
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE	Persentase OPD Yang Menerapkan Keamanan Informasi	56,82%
5.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B (62,00)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.365.004.172	APBD
2.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.271.514.000	APBD
3.	Program Aplikasi Informatika	2.328.272.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.756.600	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	120.726.900	APBD
Jumlah		9.260.273.672	

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Pj. BUPATI BANJARNEGARA

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BANJARNEGARA

R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH, MH
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Setya Adi Prabayuwana

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH.
Pembina Tk. 1 / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Ir. Setya Adi Prabayuwana
Pembina Tk. 1 / IV/b
NIP. 19660507 199903 1 005

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sekretaris Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nama : Ir. Setya Adi Prabayuwana
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	14 dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan daerah	1 dokumen
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	1 laporan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah	1 dokumen
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	1 laporan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.177.577.731	APBD
a.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	APBD
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.163.334.260	APBD
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.265.000	APBD
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	265.776.000	APBD
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.192.471	APBD
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.010.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika



R. Riono Rahadi Prsetyo, SH., MH.
Pembina Tk. I/IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Banjarnegara, 16 Januari 2023
Pihak Pertama
Sekretaris Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika



Ir. Setya Adi Prabayuwana
Pembina Tk. I/IV/b
NIP. 19660507 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khadir, SH.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : R. Riono Rahadi Prasetyo, SH, MH

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

R. Riono Rahadi Prasetyo, SH, MH
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Khadir, SH
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19650815 199103 1 009

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nama : Khadir, SH
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Informasi yang Dikelola	100%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.271.514.000	APBD
a.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.271.514.000	APBD

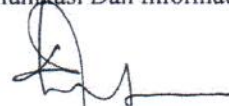
Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika



R. Riono Rahadi Prasetyo, SH, MH
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika



Khadir, SH
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19650815 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwik Pratiwi, SE., M.SI.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH.
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Wiwik Pratiwi, SE., M.SI.
Pembina / IV/a
NIP. 19670119 198903 2 006

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nama : Wiwik Pratiwi, SE., M.SI.
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100%
2.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang Di Asesmen Indeks KAMI	100%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.756.600	APBD
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47.812.600	APBD
b.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.409.000	APBD
c.	Pengembangan Infrastruktur	50.000.000	APBD
d.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	61.535.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	120.726.900	APBD
a.	Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	114.556.900	APBD
b.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000	APBD

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika



R. Riono Rahadi Prsetyo, SH., MH.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika



Wiwik Pratiwi, SE., M.SI.
Pembina / IV/a
NIP. 19670119 198903 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri Setyobudi, ST, ME

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Heri Setyobudi, ST, ME
Pembina IV/a
NIP. 19680307 200212 1 009

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Nama : Heri Setyobudi, ST, ME
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah dan pelayanan publik yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	44 OPD
2.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Pusat Data Pemerintah/Data Center	60%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.328.272.000	APBD
a.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.260.860.000	APBD
b.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.067.412.000	APBD

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika


R. Riono Rahadi Prsetyo, SH., MH.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19640217 198607 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Heri Setyobudi, ST, ME
Pembina IV/a
NIP. 19680307 200212 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lestari Puji Utami, SH.
Jabatan : Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Setya Adi Prabayuwana
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Ir. Setya Adi Prabayuwana
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19660507 199903 1 005

Pihak Pertama
Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Lestari Puji Utami, SH.
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19760110 200801 2 010


Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nama : Lestari Puji Utami, SH.
 Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	40 orang/bulan
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110 dokumen

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah	5.177.577.731	APBD
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	APBD
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	APBD
c.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.072.084.260	APBD
d.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.250.000	APBD

Pihak Kedua
 Sekretaris Dinas
 Dinas Komunikasi Dan Informatika



Ir. Setya Adi Prabayuwana
 Pembina Tk. I / IV/b
 NIP. 19660507 199903 1 005

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Pertama
 Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 Dinas Komunikasi Dan Informatika



Lestari Puji Utami, SH.
 Penata Tk. I / III/d
 NIP.19760110 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Sugiarto, A.Md.
Jabatan : Plh. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Setya Adi Prabayuwana
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Ir. Setya Adi Prabayuwana
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19660507 199903 1 005

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Pertama
Plh. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Achmad Sugiarto, A.Md.
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19701023 199603 1 003

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Plh. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nama : Achmad Sugiarto, A.Md.
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	276 eksemplar
4.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket
5.	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit
9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranan dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.177.577.731	APBD
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	APBD
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.265.000	APBD
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	APBD
d.	Pengadaan Mebel	42.270.000	APBD
e.	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.506.000	APBD
f.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	APBD
g.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.192.471	APBD
h.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.030.000	APBD
i.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000	APBD
j.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.980.000	APBD

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas
Dinas Komunikasi Dan Informatika



Ir. Setya Adi Prabayuwana
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19660507 199903 1 005

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Pertama
Plh. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi Dan Informatika



Achmad Sugianto, A.Md.
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19701023 199603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tutus Liyanto, S.Kom
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pelayanan
Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khadir, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Khadir, SH
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19650815199103 1 009

Pihak Pertama
Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator
Urusan Pelayanan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tutus Liyanto, S.Kom
Penata Tk. I / III/d
NIP. 197507282002121002

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pelayanan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Nama : Tutus Liyanto, S.Kom
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelola Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen
2.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen


No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.271.514.000	APBD
a.	Pengelola Media Komunikasi Publik	257.880.000	APBD
b.	Pelayanan Informasi Publik	8.890.000	APBD

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Khadin, SH
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19650815 199103 1 009

Pihak Pertama
Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pelayanan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Tutus Liyanto, S.Kom
Penata Tk. I / III/d
NIP.197507282002121002



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Kadarwati, SE
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pengelolaan Informasi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khadir, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Khadir, SH
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19650815 199103 1 009

Pihak Pertama
Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator
Urusan Pengelolaan Informasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kiki Kadarwati, SE
Penata / III/c
NIP. 19790905 200501 2 009

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pengelolaan Informasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika

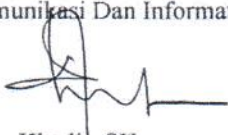
Nama : Kiki Kadarwati, SE
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 dokumen
2.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen
3.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 dokumen
4.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	160 orang
5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 dokumen


No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.271.514.000	APBD
a.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20.976.000	APBD
b.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	216.777.000	APBD
c.	Layanan Hubungan Media	506.093.000	APBD
d.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	113.148.000	APBD
e.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	147.750.000	APBD

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Khadir, SH
Penata Tk.II / III/d
NIP. 19650815 199103 1 009

Pihak Pertama
Pranata Humas Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pengelolaan Informasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Kiki Kadarwati, SE
Penata Tk.III/c
NIP. 19790905 200501 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Budiarto, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pengelola Infrastruktur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heri Setyobudi, ST, ME
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Heri Setyobudi, ST, ME.
Pembina / IV/a
NIP. 19680307 200212 1 009

Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator
Urusan Pengelola Infrastruktur
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Agus Budiarto, S.Kom.
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19750809 200901 1 004

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pengelola
Infrastruktur
Dinas Komunikasi Dan Informatika

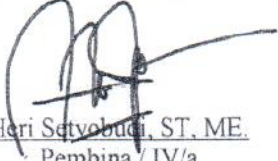
Nama : Agus Budiarto, S.Kom
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 sistem
2.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	195 dokumen
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	3 dokumen

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.328.272.000	APBD
a.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.260.860.000	APBD
b.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	10.224.500	APBD
c.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	407.007.500	APBD

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Heri Setyobudi, ST, ME.

Pembina / IV/a
NIP. 19680307 200212 1 009

Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator
Urusan Pengelola Infrastruktur
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Agus Budiarto, S.Kom.

Penata Tk. I / III/d
NIP. 19750809 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Anjarningsih, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pelayanan Pengembangan Pengelola Aplikasi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Heri Setyobudi, ST, ME
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan
E-Government
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Heri Setyobudi, ST, ME
Pembina IV/a

NIP.19680307 200212 1 009

Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator
Urusan Pelayanan Pengembangan Pengelola
Aplikasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Erni Anjarningsih, S.Kom
Penata Tk. I/III/d

NIP. 19790130 200501 2 011

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pelayanan
Pengembangan Pengelola Aplikasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika

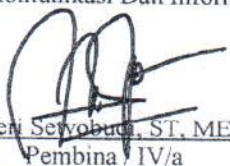
Nama : Erni Anjarningsih, S.Kom
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen
2.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	47 aplikasi


No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.328.272.000	APBD
a.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	298.030.000	APBD
b.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	352.150.000	APBD

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan
E-Government
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Heri Setyobudi, ST, ME
Pembina IV/a
NIP.19680307 200212 1 009

Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Muda, Sub Koordinator
Urusan Pelayanan Pengembangan Pengelola
Aplikasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Erni Anjarningsih, S.Kom
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19790130 200501 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Sugiarto, A.Md.

Jabatan : Kepala Seksi Persandian

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Wiwik Pratiwi, SE., M.SI.


Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Wiwik Pratiwi, SE., M.SI.
Pembina / IV/a
NIP. 19670119 198903 2 006

Banjarnegara, 16 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Seksi Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Achmad Sugiarto, A.Md.
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19701023 199603 1 003


Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Seksi Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nama : Achmad Sugiarto, A.Md.
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

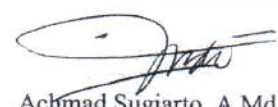
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan
2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan	25 OPD

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	120.726.900	APBD
a.	Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	114.556.900	APBD
b.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Wiwik Pratiwi, SE., M.SI.
Pembina / IV/a
NIP. 19670119 198903 2 006

Banjarnegara, 16 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Seksi Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Achmad Sugiarto, A.Md.
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19701023 199603 1 003

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Seksi Statistik
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Nama : Lestari Puji Utami, SH.
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen (BDA, KDA, Metadata Statistika Sektoral)
2.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	44 dokumen
3.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 paket
4.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	44 orang


No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.756.600	APBD
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47.812.600	APBD
b.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.409.000	APBD
c.	Pengembangan Infrastruktur	50.000.000	APBD
d.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	61.535.000	APBD

Banjarnegara, 16 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Wiwik Pratiwi, SE., M.Si.
Pembina / IV/a
NIP. 19670119 198903 2 006

Pihak Pertama
Kepala Seksi Statistik
Dinas Komunikasi Dan Informatika


Lestari Puji Utami, SH.
Penata Tk. 1 / III/d
NIP.19760110 200801 2 010